

DAFTAR PUSTAKA

- Adagbabiri, M. M. (2015). *Accountability and Transparency: An Ideal Configuration for Good Governance*. 5(21), 1–5.
- Alwi. (2004). *Model Akuntabilitas Kebijakan Publik (Studi Kasus Jaringan Implementasi Kebijakan Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar)*. 10, 1–24.
- Ayuni, C. I., & Hidayat, Z. (2019). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa di Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang. *Journal of Politic and Governement Studies*, 8(2), 1–18.
- Daerah, D. B. P. P. K. (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Darmawan, D. (2008). *Dunia Usaha dan Pelayanan Publik (Studi Tentang Minat Usaha Kecil dalam Mengurus Perizinan di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara)*. Universitas Indonesia.
- Dewi, M. S., & Ferayani, M. D. (2019). *Motivasi Memoderasi Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Pada Kinerja Individu*.
- Dewi, N. K. A. J. P., & Gayatri, G. (2019). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(2), 1269–1298. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i02.p16>
- Fariyansyah, A., Irianto, G., & Roekhudin. (2018). Akuntabilitas Vertikal-Horizontal Aparatur Publik dalam Perspektif Interpretive Phenomenology Heidegger. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 5(2), 168–177.
- Harmiati, & Zulhakim, A. A. (2017). *Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Mengembangkan Usaha dan Ekonomi Masyarakat Desa Yang Berdaya Saing di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN*.
- Haryanto, Sahmuddin, & Arifuddin. (2007). *Akutansi Sektor Pubblik* (Edisi Pert). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Karyadi, M. (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi di Kecamtan Aikmel dan Kecamatan Lenek Tahun 2018). *Journal Illmiah Rinjani*, 7(2), 33–46.
- Kuangan, K. (2017). *Buku Pintar Dana Desa: Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.jogloabang.com/pustaka/buku-pintar-dana-desa>

- Khotami. (2017). *The Concept of Accountability in Good Governance*. 163(Icodag), 30–33.
- Kurniasih, D., Setyoko, P. I., Imron, M., & Wijaya, S. S. (2019). The role of stakeholders in the Accountability of Village Enterprise Management: a Public Governance Approach. *Earth and Environmental Science*, 255, 1–8. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/255/1/012056>
- Lindberg, S. I. (2009). Accountability: the core concept and its subtypes. *Africa Power & Politics*, 1, 1–23.
- Mardiasmo. (2000). Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah: Implementasi Value for Money Audit Sebasai Antisipasi Terhadap Tuntutan Akuntabilitas Publik. *JAAI*, 4(1), 35–49.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (Third Edit). SAGE Publications.
- Neuman, W. L. (2011). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (Seventh Ed). Allyn & Bacon.
- Nurhakim, I., & Yudianto, I. (2018). Implementation of Village Fund Management. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 1(2), 39–55. <https://doi.org/10.24198/jaab.v1i2.18346>
- Olaopa, T. (2016). *GOOD GOVERNANCE: ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN*. 28–44.
- Ramadana, C. B., Ribawanto, H., & Suwondo. (2010). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). 1(6), 1068–1076.
- Ridlwani, Z. (2019). Payung Hukum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 7(September 2013), 355–370.
- Stapenhurst, R., & O'Brien, M. (2005). *Accountability in Governance*. 1–5.
- Subroto, A. (2009). *Akuntabilitas pengelolaan dana desa (Studi Kasus Pengelolaan Dana Desa di Desa-desa dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)*. Universitas Diponegoro.
- Thomas. (2013). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebangung Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. *EJournal Pemerintahan Integratif*, 1(1), 51–64.